

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konstelasi negara Indonesia, secara hierarki administratif memiliki wilayah yang lebih rendah, meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga. Selain memiliki hierarki wilayah, Indonesia juga memiliki struktur geografis yang unik, terdiri dari pulau-pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, maka menjadi suatu hal yang lumrah bahwa setiap daerahnya memiliki keanekaragaman dan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda. Dengan adanya perbedaan karakteristik antarwilayah tersebut menimbulkan dampak, baik kelebihan dan kekurangan. Salah satunya yaitu dampak kesenjangan antarwilayah dikarenakan adanya kebutuhan dan potensi yang dimiliki beragam.

Salah satu solusi yang tercipta untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan adanya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah,

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1).

Artinya tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama secara mandiri untuk dapat mengembangkan dan memaksimalkan perekonomian wilayahnya guna mensejahterakan kehidupan masyarakat, yang umumnya tercermin melalui pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan ekonomi wilayah sendiri merupakan suatu proses yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur ekonomi yang berjalan di dalam masyarakat. Baik dalam ruang lingkup nasional maupun daerah, pengembangan ekonomi merupakan pembangunan ekonomi, yaitu suatu proses untuk mengelola sumberdaya dan membentuk pola hubungan antara pemerintahan daerah dengan pihak lain untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2010).

Salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi merupakan akibat dari adanya perbedaan karakteristik sumber daya tiap daerah yang secara langsung mendorong pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpikir dan berinisiatif dalam mengembangkan pertumbuhan kegiatan ekonomi daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Todaro & Smith (2003), keberhasilan pembangunan ekonomi di dalam suatu negara mencakup tiga hal, meliputi (1) ketahanan (*sustenance*) yaitu kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan pokok, (2) harga diri (*self esteem*) yaitu meningkatnya harga diri masyarakat sebagai manusia, dan (3) *freedom from*

servitude atau kebebasan bagi tiap individu sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai tolak ukur keberhasilan perkembangan atas pembangunan ekonomi lazimnya melihat pada pertumbuhan ekonomi. Mengingat pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada kinerja perekonomian di suatu daerah, di mana ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi, maka aktivitas perekonomian baik dari fungsi faktor investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, maupun perdagangan memberi dampak pada perubahan total pendapatan, pendapatan per kapita dan penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi memiliki makna sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan tertentu pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan teori ekonomi neo klasik menurut teori Joseph Schumpeter mengenai pertumbuhan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu negara terjadi jika pengusaha mampu berinovasi dan dapat memberikan formula kombinasi baru atas proses produksinya (Hasan & Azis, 2018).

Menurut Mankiw (2013), salah satu indikator untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/*Gross Regional Domestic Product* (GRDP) atas dasar harga konstan (ADHK), karena merupakan total nilai tambah atas setiap unit usaha yang memberikan kontribusi pada suatu wilayah, dan penggunaan ADHK dapat memberikan gambaran perbedaan riil dari waktu ke waktu.

PDRB setiap daerah cenderung dipengaruhi oleh sektor unggulan (sektor basis) komparatif yang menjadi spesialisasi atas potensi daerah. Dalam teori basis ekonomi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi adalah adanya hubungan

permintaan barang dan jasa dari luar wilayah produksi, atau produk ekspor barang dan jasa. Sektor yang berkembang keluar dari suatu wilayah tersebut disebut sebagai sektor basis, yaitu kegiatan yang hasilnya (barang dan/atau jasa) ditujukan untuk ekspor keluar dari lingkungan masyarakat regional, nasional, dan internasional (Hendayana, 2003). Memberikan makna bahwa tidak hanya faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah, akan tetapi juga ada faktor eksternal berupa permintaan dari luar daerah. Permintaan atas barang ekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui *multiplier effect* yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja.

Tabel I.1 PDRB Provinsi Bengkulu dan PDB Indonesia pada Tahun 2010 s.d. 2019 atas dasar harga konstan

Tahun	Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 (Juta Rupiah)			
	PDRB Prov. Bengkulu	Kontribusi (%)	PDB Indonesia	Kontribusi (%)
2019	46.345.454	0,44	10.498.755.900	100
2018	44.164.111	0,44	10.002.892.800	100
2017	42.073.516	0,44	9.531.259.100	100
2016	40.076.544	0,44	9.097.697.900	100
2015	38.066.006	0,44	8.699.535.300	100
2014	36.207.146	0,43	8.351.368.700	100
2013	34.326.372	0,43	7.953.312.300	100
2012	32.363.038	0,43	7.560.262.800	100
2011	30.295.054	0,42	7.142.634.200	100
2010	28.352.572	0,42	6.683.679.800	100

Sumber: Diolah dari data BPS Provinsi Bengkulu dan Indonesia

Pemilihan Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian dikarenakan dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Bengkulu termasuk sebagai lima provinsi dengan kontribusi PDRB ADHK 2010 terendah. Dengan total PDRB pada tahun 2019 sebesar Rp42.073,52 miliar, dan konsisten berkontribusi sebesar 0,42% s.d. 0,44% terhadap total PDB Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun setiap

tahunnya kegiatan ekonomi di Provinsi Bengkulu mengalami total pendapatan secara agregat meningkat positif.

Penerapan otonomi daerah seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui perumusan corak kebijakan sebagai momentum untuk dapat mengoptimalkan potensi dan peluang atas sumberdaya daerah guna meningkatkan tingkat kesejahteraan dan produktivitas masyarakat Provinsi Bengkulu. Maka dari itu, Provinsi Bengkulu perlu mengidentifikasi sektor ekonomi apa saja yang menjadi sektor ekonomi unggulan yang mendongkrak PDRB Provinsi Bengkulu dan menjadi efek pengganda terhadap sektor lain di dalam PDRB, karena sejatinya untuk mencapai keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari produktivitas masyarakatnya.

Selain identifikasi dan analisis sektor unggulan, dalam mencapai konsep efisiensi kebijakan pemerintah daerah, diperlukan kegiatan pencegahan (preventif), meliputi identifikasi dan analisis apakah akan terjadi pergeseran sektor basis dan nonbasis di masa yang akan datang, analisis penyebab terjadinya pergeseran sektor basis dan nonbasis, serta melakukan prediksi terhadap proyeksi data PDRB Provinsi Bengkulu mengingat informasi historis PDRB umumnya dapat mewakili arah proyeksi di masa yang akan datang.

Latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas, mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan pokok tersebut dengan mengambil judul “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Provinsi Bengkulu.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sektor ekonomi apakah yang menjadi sektor basis di Provinsi Bengkulu pada periode 2010-2019?
2. Apakah terjadi pergeseran posisi pada sektor ekonomi di Provinsi Bengkulu?
3. Sektor apakah yang menjadi penyebab pergeseran posisi sektor ekonomi di Provinsi Bengkulu?
4. Bagaimanakah hasil perhitungan prediksi atas proyeksi tren data PDRB Provinsi Bengkulu?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor ekonomi unggulan di Provinsi Bengkulu pada periode 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pergeseran posisi pada sektor ekonomi di Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang.
3. Untuk mengetahui penyebab pergeseran posisi pada sektor ekonomi di Provinsi Bengkulu.
4. Untuk mengetahui hasil perhitungan prediksi atas proyeksi tren data PDRB Provinsi Bengkulu.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup di dalam penulisan karya tulis ini berfokus pada wilayah administratif Provinsi Bengkulu dalam menentukan sektor ekonomi unggulannya terhadap Indonesia sebagai *parent area*, dengan terbatas pada rentang waktu tahun 2010 - 2019. Untuk mengetahui sektor basis (unggulan), akan digunakan metode *Location Quotient* (LQ). Untuk mengetahui perubahan posisi pada sektor ekonomi digunakan metode *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Untuk mengetahui penyebab atas perubahan posisi pada sektor ekonomi daerah digunakan metode *Shift Share Analysis* (SSA). Sedangkan, untuk memperoleh data proyeksi tren PDRB Provinsi Bengkulu digunakan metode regresi.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini meliputi:

1. Bagi penulis, untuk memberikan ruang implementasi atau pengaplikasian ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan, dan ekonomi makro yang telah diperoleh dalam perkuliahan di PKN STAN.
2. Bagi pemerintah daerah dan pembuatan kebijakan di Provinsi Bengkulu, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengoptimalkan pengarahannya kebijakan perekonomian di Provinsi Bengkulu.
3. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, menjadi batu pijakan untuk memberikan tambahan ide, pengetahuan, informasi, dan wawasan, terkait materi ekonomi sektor basis.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Memuat mengenai uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan KTTA.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan identifikasi dan gambaran umum Provinsi Bengkulu sebagai objek penulisan KTTA, serta landasan teori yang meliputi terminologi dan teori ekonomi regional, pembangunan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi regional, konsep sektor unggulan, metode LQ, DLQ, SSA, dan regresi.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penggunaan metode/teknik untuk mengolah data PDRB (berdasarkan lapangan usaha) guna mengungkap secara jelas terkait pembahasan atas hasil dari rumusan masalah yang bermuara pada penentuan sektor ekonomi unggulan di Provinsi Bengkulu.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan dari hasil pembahasan, yang akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan KTTA.